



E-ISSN: 2722-8576

E-ISSN: 1978-7014

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
VOLUME 16 NOMOR 2, SEPTEMBER 2025

KONFLIK LEGITIMASI *SULINGGIH SAPTA RSI* JAWA DI SIDOARJO JAWA TIMUR

(Analisis Sosio-Religius Terhadap Pelayanan Umat dan Pengakuan
Kelembagaan)

I Made Subakti^{1,}, I Wayan Arsiawan Adi², I Ketut Abadi Putra³*

^{1,2,3}Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Email: ¹baleagung@gmail.com*, ²arsriawanadi@gmail.com, ³akarabadi.putra@gmail.com

*Penulis Koresponden

Keywords:

*Sulinggih Sapta
Rsi Jawa, PHDI,
Legitimacy, Diksa,
Aguron-guron,
Siwa Sasana, Desa
Kala Patra.*

Abstract

This article examines the legitimacy conflict experienced by the Sulinggih of Sapta Rsi Jawa, specifically Romo Rsi Hasto Dharmo Eko Telabah, in providing spiritual guidance to the Hindu community in Indonesia. Despite having actively and widely provided religious services with an approach rooted in Javanese tradition, formal recognition from the local Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) has not yet been fully obtained. This qualitative research utilizes data from questionnaires distributed to East Javanese Hindu figures, digital footprints, and literature reviews, with a focus on the textual analysis of the Lontar Siwa Sasana and sociological perspectives on authority. The findings indicate that the aguron-guron (discipleship) and diksa (initiation) processes of Sapta Rsi Jawa, which differ from the standard procedures of the PHDI, are the root of the issue. On the other hand, the community feels a tangible benefit from the services of Sapta Rsi Jawa, which fill a void in spiritual guidance by imparting local wisdom. This article concludes that there is a clash between the charismatic-traditional legitimacy possessed by Sapta Rsi Jawa and the bureaucratic-legal legitimacy held by the PHDI. The recommendation proposed is the necessity for dialogue, mediation, and the application of the Desa Kala Patra principle to achieve harmonization for the benefit of the entire Hindu community.

Kata kunci:

*Sulinggih, Sapta
Rsi Jawa, PHDI,
Legitimasi, Diksa,*

Abstrak

Artikel ini mengkaji konflik legitimasi yang dialami oleh Sulinggih Sapta rsi Jawa, khususnya Romo Rsi Hasto Dharmo Eko Telabah, dalam menjalankan pembinaan umat Hindu di Indonesia. Meskipun telah aktif memberikan pelayanan keagamaan secara

luas dengan pendekatan tradisi Jawa, pengakuan formal dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) setempat belum sepenuhnya diperoleh. Penelitian kualitatif ini menggunakan data dari kuesioner tokoh Hindu Jawa Timur, jejak digital, dan kajian pustaka, dengan fokus pada analisis teks *Lontar* Siwa Sasana dan perspektif sosiologis mengenai otoritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses aguron-guron dan *diksa Sapta rsi* Jawa yang berbeda dari prosedur standar PHDI menjadi pangkal persoalan. Di sisi lain, umat merasakan manfaat nyata dari pelayanan *Sapta rsi* Jawa yang mengisi kekosongan pembinaan dengan kearifan lokal. Artikel ini menyimpulkan adanya benturan antara legitimasi karismatik-tradisional yang dimiliki *Sapta rsi* Jawa dengan legitimasi birokratis-legal yang dipegang PHDI. Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya dialog, mediasi, dan penerapan prinsip Desa Kala Patra untuk mencapai harmonisasi demi kepentingan umat Hindu secara keseluruhan.

PENDAHULUAN

Dalam tatanan kehidupan umat Hindu, seorang *Sulinggih* atau *Pandita* memegang peranan sentral sebagai pemimpin upacara, pembimbing rohani, dan guru spiritual. Kedudukan ini menuntut tidak hanya penguasaan ajaran agama (*Tattwa, Susila, Acara*), tetapi juga kesucian diri dan perilaku luhur yang menjadi teladan bagi umat. Proses menjadi seorang *Sulinggih*, yang dikenal dengan istilah *Diksa Dwijati* (lahir kedua kali), merupakan sebuah transformasi spiritual mendalam yang diatur melalui berbagai pedoman, baik yang bersumber dari teks-teks kuno maupun ketetapan lembaga keagamaan resmi. Di Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) berfungsi sebagai majelis tertinggi umat Hindu yang salah satu tugasnya adalah mengatur, membina, dan mengembangkan kehidupan umat, termasuk dalam hal Ke-*sulinggih*-an. PHDI telah menetapkan berbagai persyaratan dan prosedur administratif terkait proses *diksa* dan pengakuan seorang *Sulinggih*.

Fenomena menarik muncul dengan kehadiran *Sulinggih Sapta Rsi* Jawa. Kelompok *Sulinggih* ini, yang salah satunya adalah Romo Rsi Hasto Dharmo Eko Telabah dari Sidoarjo, Jawa Timur, diinisiasi melalui proses *aguron-guron* (bimbingan guru) dan *diksa* oleh Ida Swargi Ida Nabe Pedanda Gde Telabah. *Sapta Rsi* Jawa dikenal aktif melakukan pembinaan umat melalui berbagai upacara keagamaan dengan pendekatan yang kental dengan tradisi dan kearifan lokal Jawa. Namun, keberadaan mereka, khususnya Romo Rsi Hasto Dharmo Eko Telabah, menghadapi tantangan terkait legitimasi formal dari PHDI setempat, meskipun pelayanan mereka diterima luas oleh umat.

Di Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) berfungsi sebagai majelis tertinggi umat Hindu yang salah satu tugasnya adalah mengatur, membina,

dan mengembangkan kehidupan umat, termasuk dalam hal Ke-*sulinggih*-an. Berdasarkan data kementerian agama RI yang dipublikasikan tanggal 24 Agustus 2022, umat Hindu di Jawa Timur berjumlah 104.658 jiwa yang tersebar dari berbagai wilayah kabupaten kota (Kementerian Agama, n.d.). Jumlah tersebut berada pada peringkat ke 6 pemeluk Agama Hindu yang ada di Indonesia sebagaimana ditampilkan dalam tabel 1 di bawah. Perkembangan agama Hindu di Jawa Timur dalam 2 tahun terakhir cukup pesat sebagaimana data yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama Jawa Timur Tahun 2024, Jumlah penganut Agama Hindu mencapai 392.322 Jiwa (Kementerian Agama Jawa Timur, 2024). Sebaran pemeluk Agama Hindu di Provinsi Jawa Timur ditampilkan dalam tabel 2 dibawah.

Tabel 1
Jumlah Penduduk yang memeluk Agama Hindu di masing masing Provinsi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 10 besar

NO	PROVINSI	JUMLAH (jiwa)	PERSENTASE
1.	Bali	3.761.992	79,55 %
2.	Kalimantan Tengah	151.131	3,20 %
3.	Nusa Tenggara Barat	133.178	2,82 %
4.	Lampung	126.983	2,69 %
5.	Sulawesi Tengah	112.517	2,38 %
6.	Jawa Timur	104.658	2,21 %
7.	Sulawesi Selatan	63.560	1,34 %
8.	Sulawesi Tenggara	51.951	1,10 %
9.	Sumatera Selatan	43.198	0,91 %
10.	Kalimantan Selatan	24.158	0,51 %
11.	Provinsi lainnya	155.628	3,29 %

Sumber: Data Website Kementerian Agama RI Tahun 2022

Umat Hindu di Jawa Timur terdiri dari Umat Hindu asli jawa dan umat Hindu yang berasal dari rantauan terutama dari Bali. Keberadaan Umat Hindu etnis Jawa sangat mendominasi terutama di daerah-daerah seperti daerah Tengger (yang meliputi Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang), Kediri, Blitar, Mojokerto, Gresik, Banyuwangi, membutuhkan pelayanan sesuai dengan tata cara dan kemampuannya dalam melaksanakan yadnya. Umat Hindu dari etnis jawa masih menggunakan sesajin asli jawa walaupun diantaranya ada juga yang sudah mengadaptasi sesaji Hindu dengan Tradisi Hindu Bali. *Cok Bakal* merupakan sesaji inti dari budaya masyarakat Jawa yang umumnya dipersembahkan oleh mereka yang dari etnis Jawa

walaupun dalam persembahan, masih menggunakan *bebantenan* sesuai dengan tradisi Hindu Bali. *Cok Bakal* menggambarkan dunia beserta isinya, sebagaimana halnya *banten bali*, sesajen jawa mengandung makna dan simbol-simbol suci yang merupakan kekaguman umat manusia terhadap ciptaan Tuhan seperti adanya tampah yang melambangkan dunia, kendi melambangkan sumber kehidupan, telur melambangkan benih kehidupan dan empon-empon melambangkan *Sad Rasa* yaitu Pahit, Manis, Asin, Kecut, Asam dan Pedas (Margiyono et al., 2023). Pemimpin upacara umumnya dari *pinandita* atau *pandita* dari etnis jawa yang sering dikenal dengan romo dukun, namun belakangan, ada beberapa *pinandita* dan *pandita* yang dari etnis Bali sudah mampu melaksanakan *yadnya* dengan menggunakan *bebantenan* jawa.

Tabel 2.
Sebaran pemeluk Agama Hindu di Provinsi Jawa Timur besar berdasarkan jumlah

NO	PROVINSI	JUMLAH (Jiwa)	PERSENTASE
1.	Kab. Banyuwangi	56.426	14,38 %
2.	Kab. Blitar	54.365	13,86 %
3.	Kota Surabaya	45.071	11,49 %
4.	Kab. Probolinggo	39.875	10,16 %
5.	Kab. Kediri	31.827	8,11 %
6.	Kab. Pasuruan	26.564	6,77 %
7.	Kota Pasuruan	26.564	6,77 %
8.	Kab. Malang	23.372	5,96 %
9.	Kota. Malang	19.451	4,96 %
10.	Kab. Lumajang	13.187	3,36 %
11.	Kab. Gresik	9.638	2,46 %
12.	Kab. Jember	7.493	1,91 %
13.	Kab. Sidoarjo	4.869	1,24 %
14.	Kota Batu	3.932	1,00 %
15.	Kab. Jombang	3.805	0,97 %
16.	Kota. Madiun	3.538	0,90 %
17.	Kab. Lamongan	3.141	0,80 %
18.	Kota Kediri	2.657	0,68 %
19.	Kab. Mojokerto	2.406	0,61 %
20.	Kab. Bojonegoro	2.294	0,58 %
21.	Kota Blitar	2.068	0,53 %
22.	Kota Madiun	1.692	0,43 %

23.	Kab. Ponorogo	1.686	0,43 %
24.	Kota Probolinggo	1.609	0,41 %
25.	Kota Mojokerto	1.459	0,37 %
26.	Kab. Tulungagung	680	0,17 %
27.	Kab. Nganjuk	642	0,16 %
28.	Kab. Tuban	543	0,14 %
29.	Kabupaten lainnya di Jawa Timur		0,02 %

Sumber: Data Website Kementerian Agama Jawa Timur Tahun 2024

Pada era 10 sampai 15 tahun yang lalu, keberadaan *Sulinggih* yang berasal dari Jawa tidaklah banyak seperti sekarang, sehingga salah satu pengurus Sabha Walaka PHDI Pusat (Wakil Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Dewa Ketut Suratnaya, S.Ag., M.Pd., memprakarsai untuk melakukan *pediksan* terhadap *pinandita* dan romo dukun yang ada di Jawa, dibimbingan (*aguron guron*) oleh Ida Swargi Ida Nabe Pedande Gde Telabah yang dilaksanakan secara bertahap. Pengukuhan terhadap keberadaan *sulinggih/pandita* tersebut yang dikenal dengan *Sapta Rsi* Jawa dilaksanakan di Candi Penataran, pada 3 September 2011 dan diberi gelar *Sapta Rsi* Jawa (Om Swastiastu, n.d.). *Sulinggih*/pendeta tertua yang di-*diksa* oleh Ida Swargi Ida Nabe Pedanda Gde Telabah, Rsi Hasto Dharmo Eko Telabah telah banyak melakukan pembinaan umat melalui upacara keagamaan baik di wilayah Provinsi Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Pembinaan umat yang dijalankan pada upacara keagamaan dilaksanakan mulai dari kelahiran manusia ke dunia ini (*manusa yadnya*), upacara *piodalan* pura (*dewa yadnya*) upacara *yuning Bhubawana* (*bhuta yadnya*), memuliakan candi-candi suci peninggalan tokoh-tokoh spiritual Jawa (*rsi yadnya*) sampai pada saat manusia di kembalikan kepada Tuhan (*pitra yadnya/upacara entas-entas*).

Konsep persyaratan dan pelaksanaan *aguron-guron* serta *pediksan* yang dilakukan oleh Ida Swargi Ida Nabe Pedanda Gde Telabah terhadap *Sapta Rsi* Jawa memang berbeda dengan pelaksanaan *pediksan* yang umumnya dilaksanakan oleh umat Hindu berdasarkan keputusan PHDI, termasuk pemilihan sosok yang akan menjadi calon *Sapta Rsi* Jawa tersebut dilaksanakan berdasarkan laku spiritual beliau sebagai mana yang telah diunggah dalam media sosial youtube Mandala Chanel. Walaupun persyaratan seorang *sulinggih* sudah terpenuhi namun pemberangkatan untuk melaksanakan *aguron-guron* yang dilakukan calon *diksita* yang dikemudian hari disebut *Sapta Rsi* Jawa tersebut, tidak melalui proses PHDI setempat sehingga sampai saat tulisan ini dipublikasikan belum mendapatkan pengakuan secara resmi dari lembaga PHDI baik itu dari PHDI Kabupaten Sidoarjo maupun

PHDI Jawa Timur. Dengan adanya kondisi yang demikian itu tidak menyurutkan niat beliau yang sudah dikukuhkan menjadi Sapta Rsi Jawa tersebut untuk melaksanakan pelayanan keumatan, baik itu melayani umat Hindu di Sidoarjo maupun di luar Sidoarjo.

Rumusan asalah penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan kunci, yakni: 1) Bagaimana latar belakang kemunculan *Sulinggih Sapta Rsi* Jawa dan proses *diksa* yang mereka jalani?, 2) Bagaimana peran dan dampak pembinaan umat yang dilakukan oleh *Sulinggih Sapta Rsi* Jawa, khususnya Romo Rsi Hasto Dharmo Eko Telabah?, 3) Mengapa terjadi konflik legitimasi antara *Sulinggih Sapta Rsi* Jawa dengan PHDI setempat, dan bagaimana pandangan umat terhadap isu ini?, 4) Bagaimana analisis konflik legitimasi ini ditinjau dari perspektif teks-teks kuno Hindu (khususnya *Lontar Siwa Sasana*), konsep *Desa Kala Patra*, dan teori sosiologi agama mengenai otoritas?, dan 5) Potensi solusi atau jalur harmonisasi apa yang dapat diupayakan untuk mengatasi konflik legitimasi ini?. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah guna dapat mendeskripsikan latar belakang dan proses pembentukan *Sulinggih Sapta Rsi* Jawa, mengevaluasi peran dan dampak nyata pembinaan umat yang dilakukan oleh *Sulinggih Sapta Rsi* Jawa, menganalisis akar permasalahan konflik legitimasi dengan PHDI dan persepsi umat terkait, menawarkan analisis multidisipliner terhadap konflik legitimasi menggunakan landasan teks kuno, kearifan lokal, dan teori sosiologi, serta merumuskan rekomendasi untuk harmonisasi hubungan antara *Sulinggih Sapta Rsi* Jawa dan PHDI.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena konflik legitimasi *Sulinggih Sapta Rsi* Jawa. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yakni melalui 1) Kuesioner, disebarkan kepada tokoh-tokoh masyarakat Hindu di Jawa Timur untuk mendapatkan persepsi dan pemahaman mereka mengenai keberadaan, peran, dan permasalahan legitimasi *Sulinggih Sapta Rsi* Jawa, khususnya Romo Rsi Hasto Dharmo Eko Telabah. 2) Pelacakan jejak digital, menganalisis informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan umat yang dilakukan oleh *Sulinggih Sapta Rsi* Jawa melalui media sosial dan pemberitaan daring. 3) Kajian pustaka, mempelajari teks-teks kuno Hindu (terutama *lontar Siwa Sasana*), ketetapan dan *bhisama* PHDI, literatur akademis mengenai sosiologi agama, antropologi Hindu, serta konsep-konsep relevan seperti *Desa Kala Patra*. 4) Analisis data dilakukan secara induktif, di mana data yang terkumpul dari berbagai sumber dihadapkan pada kerangka teoretis dan konseptual yang ada, khususnya ajaran dalam *lontar Siwa Sasana*, untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan rekomendasi yang konstruktif.

PEMBAHASAN

Pada hakikatnya tata cara dan persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh seorang *walaka* untuk mencapai status *Sulinggih* atau *Pandita* adalah melalui upacara *Diksa Dwijati*, yaitu sebuah proses penyucian yang melibatkan bimbingan dari tiga guru utama: *Guru Nabe*, *Guru Waktra*, dan *Guru Saksi*. Menurut Ketetapan PHDI No. V/Kep./PHDP/68, persyaratan calon *Sulinggih* sangat ketat, mencakup kematangan spiritual, kesiapan mental, penguasaan bahasa dan ajaran agama (bahasa *Kawi*, *Sanskerta*, serta menguasai filsafat, etika, ritual), serta integritas moral dan hukum. Prosedur administrasinya mengharuskan calon mengajukan permohonan kepada PHDI setempat selambat-lambatnya tiga bulan sebelum padiksan untuk menjalani *Diksa Pariksa* bersama *Guru Nabe*. Meskipun demikian, *Bhisama* PHDI Nomor: 07/Kep/P.A. Parisada/VII/2005 memberikan fleksibilitas, mengakui berbagai sistem *Diksa Dwijati* yang bersumber dari *Weda* dan memberikan kebebasan kepada umat untuk memilih sistem *aguron-guron* (garis perguruan) yang dilandasi oleh *atmanastusti* (keyakinan batin), menyerahkan persyaratan khusus, mekanisme *diksa*, hingga *abhiseka* sepenuhnya kepada tradisi *aguron-guron* tersebut. Hal ini diselaraskan dengan Seminar Nasional Pedoman *Diksa Dwijati* Umat Hindu 2023 yang menyoroti perlunya perhatian pada pengecualian bagi *Pandita* non-etnis Bali sesuai kearifan local.

Tahapan upacara *Padiksan* terbagi tiga: *Pengawit* (meliputi *sembah pamitan* keluarga dan *amatiraga/penyekeban* yang mensyaratkan *monabrata* dan *upawasa*), *Puncak*, dan *Penguntat* (meliputi *ngaturan jauman*, *majar-ajar*, *ngelinggihang Weda*, hingga upacara *masang lingga*), di mana ritual *amatiraga* atau *seda raga* memiliki makna spiritual mendalam sebagai kelahiran kembali *dwijati* (Sukrawati, 2019). Konsep ini didukung oleh sastra suci seperti *lontar Brahmana Purana* (*Diksa rakwa ngaran ing brata mwang tapa*) dan *Yajurveda* (*Vratena diksam anoti*), yang menyamakan *diksa* dengan praktik *tapa* dan *brata*. Lebih lanjut, teks-teks Nusantara seperti, teks *Agastya Parwa*, lontar *Kidung Cowak*, dan teks *Siwa Sasana* (yang mengatur persyaratan ketat bagi calon *Nabe* yang harus menguasai *Weda* dan menaklukkan hawa nafsu serta merupakan teks kuno yang banyak mengupas tentang ajaran sasana yang harus dilakukan apabila hendak menjadi *pandita* dengan mazhab siwa yang mencakup *Saiwa Siddhanta*, *Wesnawa*, *Pasupata*, *Lepaka*, *Sanaka* (Sudarma (n.d.)) menjadi acuan penting dalam tradisi *aguron-guron*. PHDI Jawa Timur sendiri telah mencatat 12 *Sulinggih* yang prosesnya dilakukan sesuai aturan (Kementerian Agama Jawa Timur, 2024).

Penelitian Keberadaan *Sulinggih Sapta Resi* dalam pembinaan umat yang dijalankan pada upacara keagamaan walau belum mendapatkan pengakuan secara resmi

dari lembaga PHDI ini, menggunakan pendekatan induktif mengedepankan data data yang ditemukan selama proses penelitian terhadap fenomena yang berhubungan dengan penelitian ditemukan kemudian di kaji berdasarkan satra agama dan kaidah dimasyarakat untuk bisa dibuatkan suatu kesimpulan. Data data penelitian didapatkan dari wawancara mendalam dengan beberapa tokoh Hindu Jawa Timur dan simpatisan Romo Resi Asta yang berasal dari Sidoarjo. Berdasarkan penelitian pendahuluan terhadap sumber sumber terdekat yang mengetahui tentang terbentuknya *Sapta Rsi* Jawa, didapatkan data bahwa proses *aguron-guron* dan *diksa* yang dilaksanakan secara bertahap oleh Ida Swargi Ida Pedanda Gde Telabah sesuai dengan urutan sebagaimana ditampilkan dalam tabel 4 dibawah.

Tabel 4.
Daftar Nama *Sulinggih* Sapta Resi Jawa

NO	NAMA	NAMA WALAKA	KETERANGAN
1.	Rsi Hasto Dharmo Eko Telabah	Mangku Karyono	Griya Sidoarjo
2.	Wiku Satya Dharmo Telaga	Mangku Bibit	Griya Salatiga
3.	Rsi Bahudanda Sajiwo Dharmo Telabah	Wasi Sajiman	Griya Klaten Telah berpulang 21 Oktober 2021
4.	Rsi Rahmadi Dharmo Telabah	Mangku Ahmad	Griya Batu Malang Telah berpulang 11 Januari 2020
5.	Rsi Adhyaksa Dharmo Telabah	Mangku Sukamto	Griya Blitar
6.	Pandito Setyadi Dharmo Putra Telaga	Pinandito Suharto	Griya Tegal Saat ini berdomisili di Singaraja Bali
7.	Dwijati Prawiro Dharmo Telabah	Pinandito Tresno Dwijo	Griya Dieng Telah berpulang 17 12 2021

Sumber: Dari berbagai Sumber

Dalam *lontar Putra Sasana* telah dijelaskan secara gamblang bahwa pendidikan pra-diksa tidak hanya dilakukan dalam 1 sampai 2 tahun menjelang *diksa* tetapi sesungguhnya pendidikan tersebut dimulai semenjak anak tersebut mulai mengenal pendidikan melalui keluarganya, untuk selanjutnya melewati pendidikan formal sehingga membuka wawasannya tentang ilmu pengetahuan di dunia ini sehingga pada saat menjadai pendeta dapat memberikan petunjuk dan tuntunan kepada masyarakat, dan yang terakhir

adalah berumah tangga mampu mengendalikan nafsunya sehingga bisa setia dan menerapkan kehidupan yang bahagia bersama pasangannya yang sah secara hukum (Sugiharta & Herawan, 2023).

Romo Rsi Hasto Dharmo Eko Telabah, dengan nama *walaka* Jro Mangku Karyono, berasal dari Sidoarjo dan dikenal sebagai sosok sederhana dengan latar belakang spiritualitas Jawa yang kuat. Sebelum di-*diksa*, beliau adalah seorang *pinandita* di Pura Penataran Agung Margowening, Krembung, dan memiliki kegemaran dalam *tapa-brata* serta laku spiritual Jawa. Perkenalan dengan Ida Nabe Pedanda Gde Telabah (seorang akademisi, Dr. Ida Bagus Ngurah Narendra, M.PH, DR.PH) terjadi saat upacara di Candi Penataran. Ida Nabe tertarik dengan pemahaman Jro Mangku Karyono mengenai bebantenan dan ritual Jawa, sehingga sering mengundangnya ke Bali untuk berdiskusi dan mempraktikkan upacara adat Jawa. Proses diskusi dan praktik intensif yang berlangsung lebih dari enam bulan ini dianggap sebagai bentuk *aguron-guron*. Akhirnya, atas kesediaan Jro Mangku Karyono, *Ida Nabe* men-*diksa* beliau, dengan seluruh proses dan biaya ditanggung oleh griya *Ida Nabe*.

Pembinaan umat yang dilaksanakan oleh Romo Rsi Hasto Dharmo Eko Telabah mulai dari upacara *manusa yadnya* sampai pada upacara *pitra yadnya*, sebagaimana ditampilkan pada gambar 1.



Gambar 1.
Pembinaan Umat Melalui *Panca Yadnya* yang dilakukan oleh
Romo Rsi Hasto Dharmo Eko Telabah

Pelayanan umat yang dilaksanakan oleh Romo Hasto Dharmo Eko Telabah mulai dari umat yang ada di daerah Sidoarjo dan sekitarnya, Jawa Timur, seperti Surabaya, Gresik, Jombang, Mojokerto, Malang, Blitar, Kediri, dan Banyuwangi serta daerah Hindu yang ada di Jawa Timur. Palayanan belaiu juga sampai di Jawa Tengah, Sumatra, Bali, Kalimantan dan daerah lainnya di Indonesia sebagaimana ditampilkan pada gambar 2 (Noviyanti, n.d.).



Gambar 2.

Umat Hindu se-JabodebabeK mengikuti upacara *entas-entas* di halaman parkir Pura Parahyangan Jagad Guru, BSD, Kota Tangsel, Provinsi Banten

Umat menyambut baik dan antusias kegiatan pembinaan yang dilakukan Romo Rsi Hasto. Tingkat kepercayaan dan kepuasan umat yang meminta beliau memimpin upacara (*muput*) dilaporkan sangat tinggi. Pendekatan beliau yang *njawani* (bernuansa Jawa), menggunakan *sesaji*, *mantram*, serta tradisi dan budaya Jawa, dianggap mengisi kekosongan pembinaan yang tidak terjangkau oleh *Sulinggih* dengan *pakem* Bali. Biaya upacara dengan pendekatan Jawa ini juga dirasakan tidak terlalu memberatkan umat. Kedekatan personal Romo Rsi dengan umat, seperti melayani dan makan bersama umat, juga menjadi ciri khas yang diapresiasi.

Alasan Romo Rsi Hasto Dharmo Eko Telabah dan *Sulinggih Sapta rsi* Jawa lainnya belum mendapatkan pengakuan resmi dari PHDI Kabupaten Sidoarjo maupun PHDI Jawa Timur pada dasarnya berpangkal pada proses *aguron-guron* dan *pediksan Sapta Rsi* Jawa yang tidak melalui prosedur formal yang ditetapkan PHDI setempat. Izin untuk *muput bebantenan* Jawa yang disampaikan saat *diksa* di griya Ida Nabe juga menjadi salah satu pemicu penolakan pengakuan dari pengurus Pura Penataran Agung Margowening dan PHDI Sidoarjo. PHDI memiliki aturan bahwa calon *Sulinggih* harus mengajukan permohonan dan melalui proses *diksa* pariksa di PHDI setempat.

Problematika yang dialami oleh *Sapta Rsi* Jawa pada hakikatnya dapat dianalisis melalui perspektif teks kuno (*Siwa Sasana*). Jika merujuk pada *lontar Siwa Sasana*, proses *aguron-guron* antara Ida Nabe Pedanda Gde Telabah dan Romo Mangku Karyono (Romo Rsi

Hasto) yang berlangsung intens dan mendalam, di mana terjadi transfer pengetahuan dan pengujian karakter, dapat dilihat sebagai pemenuhan esensi dari hubungan guru-murid. *Siwa Sasana* menekankan kualitas *nabe* dan kesiapan *sisya*, serta proses pembelajaran yang mendalam, bukan semata-mata prosedur administratif. Pelayanan Romo Rsi Hasto yang mengedepankan *tapa-brata*, pelayanan tanpa pamrih, dan keteduhan dalam membimbing umat juga selaras dengan nilai-nilai ke-*sulinggih*-an yang diuraikan dalam teks tersebut.

Konflik ini mencerminkan dinamika antara otoritas karismatik yang dimiliki oleh Romo Rsi Hasto dan *Sapta Rsi* Jawa lainnya dengan otoritas birokratis-legal yang dipegang oleh PHDI. Otoritas Romo Rsi Hasto bersumber dari pengakuan umat atas kemampuan spiritual, pengetahuan tradisi Jawa, dan pelayanan nyatanya (karisma personal dan tradisional). Di sisi lain, PHDI sebagai lembaga formal menjalankan otoritasnya berdasarkan aturan, prosedur, dan legalitas formal (otoritas birokratis-legal). Ketidaksesuaian prosedur *diksa Sapta Rsi* Jawa dengan standar PHDI menciptakan friksi antara dua bentuk legitimasi ini. Sejarah berbagai gerakan keagamaan menunjukkan bahwa otoritas karismatik seringkali perlu melalui proses "rutinisasi" agar dapat terintegrasi dengan struktur institusional yang ada. Konsep *desa kala patra* (tempat, waktu, dan keadaan) dalam Hindu mengajarkan fleksibilitas dan adaptasi ajaran agama sesuai dengan konteks lokal. Pendekatan *Sulinggih Sapta Rsi* Jawa yang mengakomodasi tradisi dan budaya Hindu Jawa dapat dilihat sebagai implementasi prinsip ini. PHDI, dalam anggaran dasarnya, juga mengakui pentingnya tradisi, adat-istiadat, dan kearifan budaya lokal dalam menjalankan ajaran agama Hindu. Oleh karena itu, ada ruang untuk PHDI mempertimbangkan kekhasan praktik keagamaan Hindu di Jawa yang mungkin berbeda dari tradisi di Bali, tanpa mengabaikan esensi ajaran *Weda*.

PENUTUP

Konsep konsep tentang ke-*sulinggih*-an dalam *aguron-guron*, yaitu pemilihan *guru nabe* terhadap sisya dan pemilihan *guru nabe* oleh sisya serta nilai-nilai yang meresap dan dilaksanakan oleh sisya sudah sesuai dengan tatanan dan tuntunan dalam kitab *siwa sasana*. Masih adanya penolakan pengakuan terhadap keberadaan *sulinggih* tersebut hendaknya mempertimbangkan kembali tugas dan fungsi yang diembah oleh PHDI sebagai lembaga keumatan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dan pembinaan keumatan. Pembinaan tersebut tidak hanya terhadap umat dalam tataran *walaka* tetapi terhadap *Sulinggih* yang ada sehingga tidak terjadi penyimpangan di masyarakat. Pengakuan terhadap seluruh *sulinggih* yang ada memungkinkan lembaga untuk memantau

pembinaan umat yang dilakukan oleh *sulinggih* sehingga lembaga dapat memitigasi dampak apabila terjadi penyimpangan. Konflik legitimasi *Sulinggih Sapta Rsi* Jawa, khususnya Romo Rsi Hasto Dharmo Eko Telabah, berakar pada perbedaan antara proses *diksa* dan *aguron-guron* yang mereka jalani dengan prosedur formal yang ditetapkan oleh PHDI setempat. Meskipun demikian, *Sulinggih Sapta Rsi* Jawa telah menunjukkan peran signifikan dalam pembinaan umat Hindu, terutama di Jawa, dengan pendekatan yang mengakomodasi tradisi dan kearifan lokal. Pelayanan mereka diterima secara luas dan mengisi kekosongan pembinaan spiritual yang dirasakan umat. Dari perspektif *lontar Siwa Sasana*, esensi hubungan guru-murid dan kualitas pelayanan spiritual yang ditunjukkan oleh *Sapta Rsi* Jawa memiliki landasan yang kuat. Secara sosiologis, konflik ini dapat dilihat sebagai pertemuan antara otoritas karismatik-tradisional yang melekat pada *Sapta Rsi* Jawa dengan otoritas birokratis-legal yang dipegang oleh PHDI. Umat sendiri cenderung lebih mementingkan pelayanan nyata dan ketulusan seorang *Sulinggih*, meskipun mengakui pentingnya legalitas formal.

Untuk mengatasi konflik legitimasi ini dan demi keharmonisan serta kemajuan umat Hindu, beberapa langkah dapat dipertimbangkan:

1. Dialog dan Mediasi: Perlu adanya dialog terbuka dan mediasi antara pihak *Sulinggih Sapta Rsi* Jawa dengan PHDI (baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat). Mediasi ini sebaiknya diinisiasi oleh PHDI sebagai lembaga yang mengayomi seluruh umat Hindu, untuk mencari titik temu dan pemahaman bersama.
2. Penerapan Prinsip *Desa Kala Patra*: PHDI diharapkan dapat lebih fleksibel dan menerapkan prinsip *Desa Kala Patra* dalam menyikapi keragaman praktik keagamaan Hindu di Nusantara, termasuk tradisi Hindu Jawa yang memiliki kekhasan tersendiri. Ini sejalan dengan semangat PHDI untuk menjaga keutuhan masyarakat Hindu dengan menjalankan ajaran agama berdasarkan *Weda*, tradisi, adat-istiadat, dan kearifan budaya lokal.
3. Kajian Ulang Prosedur dengan Mempertimbangkan Kearifan Lokal: PHDI dapat melakukan kajian terhadap prosedur *diksa* dan pengakuan *Sulinggih* dengan mempertimbangkan aspirasi dan praktik-praktik *aguron-guron* yang telah lama berkembang di berbagai daerah, selama tidak menyimpang dari *tattwa* agama.
4. Fokus pada Pembinaan Umat: Semua pihak hendaknya mengedepankan kepentingan pembinaan umat Hindu secara keseluruhan. Pengakuan dan dukungan terhadap *Sulinggih* yang terbukti tulus melayani dan memiliki kompetensi spiritual akan memperkuat barisan pembina umat.

5. Penguatan Peran PHDI dalam Pembinaan *Sulinggih*: Setelah adanya pengakuan, PHDI dapat memainkan peran lebih aktif dalam pembinaan berkelanjutan bagi semua *Sulinggih*, termasuk *Sapta Rsi* Jawa, untuk memastikan kualitas pelayanan dan keselarasan dengan ajaran *dharma*.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan konflik legitimasi dapat terselesaikan secara bijaksana, dan potensi besar *Sulinggih Sapta Rsi* Jawa dapat terus berkontribusi optimal bagi kemajuan spiritual umat Hindu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Jawa Timur (2024). *Jumlah Pemeluk Agama Hindu Kementerian Agama Jawa Timur*. [https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Profil Bimas Hindu Tahun 2024/PROFIL BIMAS HINDU TAHUN 2024.pdf](https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Profil%20Bimas%20Hindu%20Tahun%202024/PROFIL%20BIMAS%20HINDU%20TAHUN%202024.pdf)
- Kementerian Agama. (n.d.). *Jumlah Penduduk Menurut Agama*. Sekretaris Jendran Kementerian Agama. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>.
- Margiyono, T., Astuti, W., & Astuti, N. L. P. W. (2023). Analisis Bentuk dan Makna Cok Bakal dalam Sesaji Jawa. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, 28(1), 1–18.
- Noviyanti. (n.d.). *Entas-Entas, Umat Hindu Jabodebabek Ikuti*. NusaBali.Com. https://www.nusabali.com/berita/145966/umat-hindu-jabodebabek-ikuti-entas-entas#google_vignette
- Om Swastiastu. (2013, Oktober 12). *No Title*. Facebook. [www.facebook.com. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=665669276791136&id=238869579471110&set=a.239007856123949&locale=id_ID](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=665669276791136&id=238869579471110&set=a.239007856123949&locale=id_ID)
- Setiasih, L. N. (n.d.). *Ritual Abhiseka dan Parisuda Agung Sebagai Upaya Lestarikan Candi Prambanan*. Harian Sriwijaya Media. <https://hariansriwijaya.com/ritual-abhiseka-dan-parisuda-agung-sebagai-upaya-lestarikan-candi-prambanan/>
- Sudarma, I. W. (n.d.). *Salinan Lontar SIWA SASANA & Terjemahan Bahasa Indonesia*. Pustaka Hindu. <https://dharmavada.wordpress.com/2010/11/23/salinan-lontar-siwa-sasana-terjemahan-bahasa-indonesia/>
- Sugiharta, I. P. S. O., & Herawan, K. D. (2023). Pendidikan Pradīkṣā dalam *Lontar* Putra Sasana. *Sphatika: Jurnal Teologi*, 14(2), 184–199.
- Sukrawati, N. M. (2019). *Acara Agama Hindu*. Unhi Press.